

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA ALOKASI BELANJA MODAL DI PROVINSI BALI

Kadek Martini¹
A.A.N.B. Dwirandra²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: martiniikd@gmail.com / telp: +82 89 708 692 97

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Kinerja keuangan daerah diduga tidak berbanding lurus pada alokasi belanja modal, padahal belanja modal memiliki kemampuan untuk mengakselerasi perekonomian daerah. Hal ini dilihat dari riset empiris dan data absolut yang menyebutkan proporsi belanja modal secara nasional dibawah 25 persen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah pada alokasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal, rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Belanja Modal

ABSTRACT

Financial performance is not directly proportional to the area allegedly on capital expenditure, while capital expenditure has the ability to accelerate the region's economy. It is seen from the empirical research and data that says absolute proportion of capital expenditure below 25 percent nationally. The purpose of this study was to determine the effect on the financial performance of the capital expenditure. The results showed that the financial performance consisting of the dependency ratio and a significant negative effect on capital expenditure, revenue effectiveness ratio is positive but not significant effect on the allocation of capital expenditures, financing SiLPA rate ratios and significant negative effect on the allocation of capital expenditures, fiscal space ratio effect positive and significant in the allocation of capital expenditure, the efficiency ratio and a significant negative effect on capital expenditure, and the ratio of contribution of public enterprises is positive but not significant effect on capital expenditure.

Keywords: Financial Performance, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi

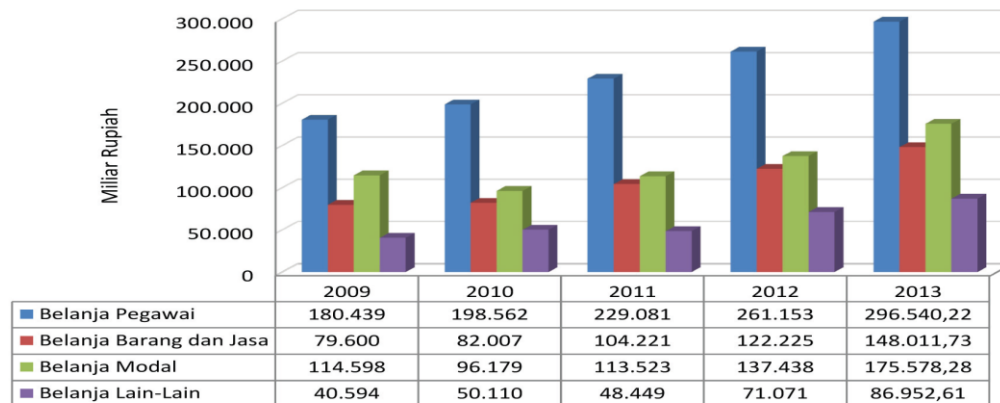
yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, pasal 4 tentang Asas Umum Pengelolaan Daerah). Dalam teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) menyewa orang lain (agen) dalam melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan memberikan beberapa wewenang kepada agen.

Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat menentukan alokasi sumber daya ke belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Agar pemerintah daerah mampu menyediakan pelayanan publik yang memadai, disinilah diperlukan alokasi belanja modal yang lebih tinggi.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah (Kuncoro, 2004). Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi

belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik. Berikut ini adalah *trend* belanja daerah tahun anggaran 2009 – 2013 (dalam miliar rupiah):

Gambar 1.
Trend Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 – 2013



Sumber: DJPK – Depkeu, 2013 (diolah)

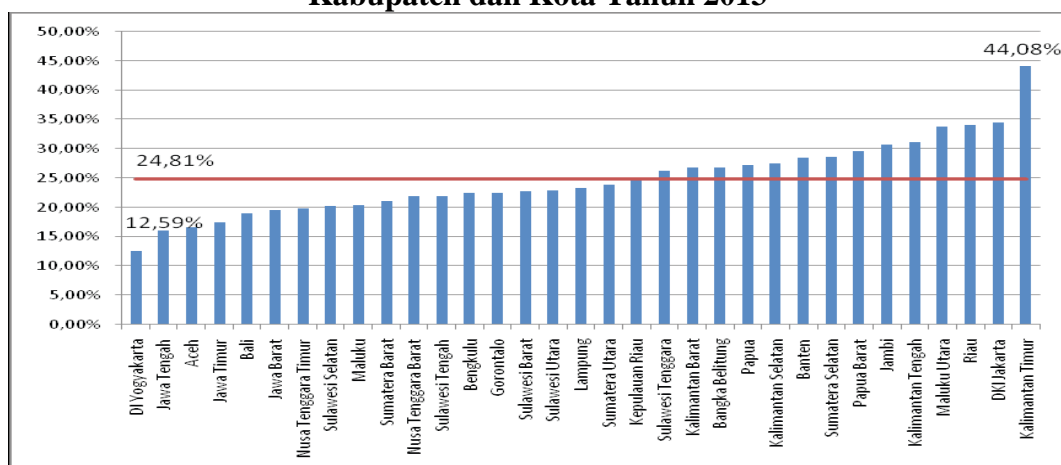
Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa proporsi tiap jenis belanja daerah setiap tahun dan *trend* kenaikan/penurunannya antar tahun. Bila dicermati belanja pegawai (langsung dan tidak langsung) secara nasional cenderung terus meningkat dari tahun 2009 hingga 2013, dimana pada tahun 2009 total belanja pegawai secara nasional baru mencapai angka Rp180,4 miliar rupiah dan di tahun 2013 meningkat menjadi Rp296,5 miliar rupiah. Rata-rata peningkatan belanja pegawai mencapai 13,2 persen. Besarnya belanja barang dan jasa juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2009 total belanja barang dan jasa secara nasional dikisaran Rp79,6 miliar rupiah dan pada tahun 2013 telah meningkat menjadi Rp148,0 miliar rupiah. Peningkatan belanja barang dan jasa secara rata-rata dari tahun 2009 hingga 2013 adalah sebesar 15,0 persen.

Fenomena yang agak berbeda terlihat dari *trend* belanja modal tahun 2009 hingga 2013, dimana secara rata-rata mengalami peningkatan di kisaran 12,7

persen dari tahun 2009 hingga 2013. Namun, bila dilihat secara nominal maka perubahan tersebut cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2009 total belanja modal mencapai Rp114,6 miliar rupiah lalu mengalami penurunan di tahun 2010 yaitu hanya sebesar Rp96,2 miliar rupiah. Peningkatan di tahun 2011 hingga di tahun 2013 total belanja modal mencapai Rp175,6 miliar rupiah. Belanja lain-lain juga cenderung fluktuatif pada tahun 2009 hingga 2013, dimana pada tahun 2009 belanja lain-lain secara total mencapai Rp40,6 miliar lalu naik menjadi Rp50,11 miliar di tahun 2010. Selanjutnya total belanja lain-lain di tahun 2011 turun lagi menjadi Rp48,4 miliar dan akhirnya pada tahun 2013 total anggaran belanja lain-lain meningkat menjadi Rp87,0 miliar. Secara rata-rata peningkatan total belanja lain-lain pada tahun 2009 hingga 2013 adalah sebesar 22,3 persen.

Berikut adalah rasio belanja modal terhadap total belanja daerah tahun 2013:

Gambar 2.
Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Agregat Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2013



Sumber : DJPK – Depkeu, 2013 (diolah)

Pada Gambar 2 dapat dijelaskan persentase rasio seluruh provinsi masih di bawah 45 persen dan rata-rata agregat provinsi, kabupaten dan kota sebesar 23,81

persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dari sebagian besar provinsi di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, sebab proporsi belanja modal yang dianggarkan masih rendah.

Penelitian ini akan membahas pengaruh kinerja keuangan daerah pada alokasi belanja modal. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, *debt service coverage ratio*, rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, rasio tingkat pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), rasio ruang fiskal, rasio efisiensi, dan rasio kontribusi BUMD (Hidayat, 2013). Namun, penelitian ini hanya menggunakan enam indikator kinerja keuangan yaitu: rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, rasio tingkat pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), rasio ruang fiskal, rasio efisiensi, dan rasio kontribusi BUMD dengan pertimbangan:

- 1) rasio ketergantungan dan rasio kemandirian bersifat *trade off*, jadi peneliti memilih memakai salah satu saja dalam penggunaannya.
- 2) indikator yang berkaitan dengan pinjaman daerah, misalnya *Debt Service Coverage Ratio*, tidak digunakan dalam penelitian ini karena kebanyakan kabupaten dan kota di Provinsi Bali tidak memiliki pinjaman daerah.

Rasio ketergantungan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi (Sularso dan Restianto, 2011). Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah

yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2007: 234). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 menyebutkan SiLPA merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan daerah dikurang Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otsus/penyesuaian, dana darurat, hibah, belanja pegawai dan belanja bunga. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* (Halim, 2007: 234), dan rasio kontribusi BUMD yang dihitung dari laba BUMD dibagi pendapatan asli daerah.

Pemilihan kabupaten dan kota di Provinsi Bali karena Bali mampu menarik minat pengunjung lokal maupun pengunjung mancanegara untuk datang ke Bali dan memiliki karakteristik pariwisata yang baik yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Ardhini dan Handayani (2011) dan Hidayat (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa rasio keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan hal tersebut diatas, hipotesis dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali” adalah sebagai berikut:

Ha.1 : Kinerja keuangan berupa rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal.

Ha.2 : Kinerja keuangan berupa rasio efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal.

Ha.3 : Kinerja keuangan berupa rasio tingkat pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal.

Ha.4 : Kinerja keuangan berupa rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal.

Ha.5 : Kinerja keuangan berupa rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal.

Ha.6 : Kinerja keuangan berupa rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal.

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian ini adalah kinerja keuangan berupa rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, rasio tingkat pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), rasio ruang fiskal, rasio efisiensi, dan rasio kontribusi BUMD serta belanja modal kabupaten dan kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Bali Sekretariat Daerah Biro Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007-2012.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya dalam kurun waktu 5 tahun (2008-2012). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian

ini adalah *sampling jenuh* yaitu teknik penyampelan bila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010:122).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Teknik analisis ini bermanfaat untuk mendeteksi pengaruh kinerja keuangan berupa rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, rasio tingkat pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), rasio ruang fiskal, rasio efisiensi, dan rasio kontribusi BUMD pada alokasi belanja modal. Tahap analisis yang dilakukan adalah uji asumsi klasik, koefisien determinasi (R^2), uji kelayakan model (F), dan uji hipotesis (t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mencakup 9 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya. Penelitian ini menggunakan data *time series*, yang digunakan selama periode 2008 hingga 2012. Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 9 kabupaten/kota x 5 tahun = 45 amatan. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Tabel 1.
Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual

N	45
Kolmogorov-Smirnov Z	0,630
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,823

Sumber: Data Diolah, 2014

Pada Tabel 1. dapat dijelaskan nilai Sig. (2-tailed) dalam One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test adalah 0,823 ($> 0,05$), sehingga H_0 diterima. Ini berarti bahwa data yang diuji menyebar normal/terdistribusi normal.

Tabel 2.
Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Total Cases	45
Number of Runs	26
Z	0,607
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,544

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 2. diatas, nilai Sig.(2-tailed) dalam uji *Runs Test* berada diatas nilai 0,05 ini berarti bahwa data tidak terjadi gejala autokorelasi.

Tabel 3. diperoleh nilai *tolerance* lebih besar dari 10 persen (0,1) dan VIF kurang dari 10 sehingga tidak ada indikasi terjadinya gejala multikolinearitas.

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		

Rasio Ketergantungan	0,546	1,830
Rasio Efektivitas PAD	0,734	1,363
Tingkat Pembiayaan SiLPA	0,796	1,256
Rasio Ruang Fiskal	0,751	1,332
Rasio Efisiensi	0,729	1,372
Rasio Kontribusi BUMD	0,596	1,677

Sumber: Data Diolah, 2014

Tabel 4.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
1 (Constant)	0,129
Rasio Ketergantungan	0,553
Rasio Efektivitas PAD	0,067
Tingkat Pembiayaan SiLPA	0,902
Rasio Ruang Fiskal	0,825
Rasio Efisiensi	0,936
Rasio Kontribusi BUMD	0,730

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 4. nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen terhadap nilai *absolute residual* berada di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

Tabel 5.
Hasil Uji Kelayakan Model

Model	F	Sig.
1 Regression	17,080	0,000
Residual		
Total		

Sumber: Data Diolah, 2014

Uji Kelayakan Model regresi linear berganda yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini telah dilakukan dan diperoleh hasil seperti pada Tabel 5. diketahui $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan model

regresi linear berganda penelitian ini telah memenuhi uji kelayakan model. Nilai R^2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.
Hasil Uji R^2

Model	R	R Square
1	0,854 ^a	0,729

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui koefisien determinasi dengan parameter $R^2 = 0,729$. Ini berarti variabel independen rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, tingkat pembiayaan SiLPA, rasio ruang fiskal, rasio efisiensi, dan rasio kontribusi BUMD mampu menjelaskan perubahan variabel dependen belanja modal sebesar 72,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 27,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Tabel 7.
Hasil Uji Hipotesis

Model	B	t	Sig.
1 (Constant)	14,393	16,963	0,000
Rasio Ketergantungan	-0,024	-6,373	0,000
Rasio Efektivitas PAD	0,001	0,377	0,708
Tingkat Pembiayaan SiLPA	-0,019	-2,250	0,030
Rasio Ruang Fiskal	0,008	2,059	0,046
Rasio Efisiensi	-0,017	-2,141	0,039
Rasio Kontribusi BUMD	0,032	1,893	0,066

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 7 dapat dijelaskan hasil uji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu: uji pengaruh rasio ketergantungan (X_1) pada alokasi belanja modal (Y) diperoleh $P\text{-Value} = 0,000$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa rasio ketergantungan (X_1) berpengaruh dan

signifikan pada alokasi belanja modal (Y). Nilai koefisien beta sebesar $-0,024$, menunjukkan adanya pengaruh negatif yang berarti jika tingkat ketergantungan tahun lalu naik sebesar 1 persen, maka alokasi belanja modal tahun berikutnya akan turun sebesar $0,024$ persen. Hasil ini gagal menolak hipotesis $H_{a.1}$ yang menyatakan rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal. Semakin rendah tingkat ketergantungan, maka daerah tersebut dikatakan semakin mandiri sehingga dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih besar. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) yang menyatakan ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Hidayat (2013) yang menunjukkan tingkat ketergantungan tahun lalu berpengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap alokasi belanja modal.

Uji pengaruh rasio efektivitas PAD (X_2) pada alokasi belanja modal (Y) diperoleh $P\text{-Value} = 0,708$ lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien beta $0,001$. Hal ini berarti bahwa rasio efektivitas PAD (X_2) berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal (Y), dimana jika rasio efektivitas PAD tahun lalu naik sebesar 1 persen, maka alokasi belanja modal tahun berikutnya akan naik sebesar $0,001$ persen. Hasil uji ini menolak hipotesis $H_{a.2}$ yang menyatakan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azkiya (2011) yang menyatakan efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Justru hasil penelitian ini berhasil membuktikan penelitian Vella, dkk (2014) yang menyatakan rasio

efektivitas keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Riau. Kondisi ini terjadi kemungkinan disebabkan oleh tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat cenderung diabaikan sehingga pengalokasian belanja modal tidak terealisasi dengan efektif dan dapat menghambat pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik. Sementara dana pada anggaran daerah yang pada dasarnya merupakan dana publik sebagian besar dibelanjakan untuk belanja pegawai, sehingga pemerintah perlu melakukan reservasi dan identifikasi ulang terhadap jumlah kebutuhan alokasi dana dari seluruh kegiatan secara lebih akurat dan detail sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Uji pengaruh tingkat pembiayaan SiLPA (X_3) pada alokasi belanja modal (Y) diperoleh $P\text{-Value} = 0,030$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien beta $-0,019$. Hal ini berarti bahwa tingkat pembiayaan SiLPA (X_3) berpengaruh negatif namun signifikan pada alokasi belanja modal (Y), dimana jika tingkat pembiayaan SiLPA tahun lalu naik sebesar 1 persen, maka alokasi belanja modal tahun berikutnya akan turun sebesar 0,019 persen. Hasil uji ini menolak hipotesis $H_{a.3}$ yang menyatakan tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2013) yang menyatakan tingkat pembiayaan SiLPA tahun lalu berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Azkiya (2011) yang menyatakan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja

modal. Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah kota/kabupaten. Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan daerah dan efisiensi sangat diharapkan sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat. Dalam penelitian ini, hasil yang berpengaruh negatif dikarenakan SiLPA yang diperoleh sebagian besar disumbangkan ke belanja operasional dibandingkan untuk belanja modal.

Uji pengaruh rasio ruang fiskal (X_4) pada alokasi belanja modal (Y) diperoleh $P\text{-Value} = 0,046$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien beta 0,008. Hal ini berarti bahwa rasio ruang fiskal (X_4) berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal (Y), dimana jika rasio ruang fiskal tahun lalu naik sebesar 1 persen, maka alokasi belanja modal tahun berikutnya akan naik sebesar 0,008 persen. Hasil ini gagal menolak hipotesis $H_{a.4}$ yang menyatakan rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2013) yang menyatakan ruang fiskal tahun lalu berpengaruh signifikan dengan arah hubungan positif terhadap alokasi belanja modal. Untuk mengalokasikan belanja modal, pemerintah daerah patut mempertimbangkan ruang fiskal yang tercipta pada tahun sebelumnya. Karena dalam menyusun anggaran (APBD) pemerintah daerah belum dapat mengetahui secara tepat pendapatan dan belanja yang akan terjadi, maka besaran yang dipakai adalah nilai estimasi.

Uji pengaruh rasio efisiensi (X_5) pada alokasi belanja modal (Y) diperoleh $P\text{-Value} = 0,039$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien beta $-0,017$. Hal ini berarti bahwa rasio efisiensi (X_5) berpengaruh negatif namun signifikan pada alokasi belanja modal (Y), dimana jika rasio efisiensi tahun lalu naik sebesar 1 persen, maka alokasi belanja modal tahun berikutnya akan turun sebesar 0,017 persen. Hasil ini menolak hipotesis $H_{a.5}$ yang menyatakan rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azkiya (2011) yang menyatakan efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Ardhini dan Handayani (2011) yang menyatakan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif namun signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik. Namun tidak berhasil membuktikan penelitian yang dilakukan oleh Vella, dkk (2014) yang menyatakan rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Riau. Semakin tinggi rasio efisiensi, pengeluaran daerah dalam hal ini belanja modal semakin menurun. Penggunaan keuangan daerah yang tidak efisien dengan angka rasio yang tinggi dapat disebabkan karena jumlah realisasi pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan itu sendiri, sehingga terjadi pemborosan untuk belanja daerah tetapi tidak digunakan secara maksimal untuk belanja modal. Hal tersebut dikarenakan lebih besarnya belanja pegawai di daerah dibandingkan belanja modal guna pengembangan dan pembangunan di daerah.

Uji pengaruh rasio kontribusi BUMD (X_6) pada alokasi belanja modal (Y) diperoleh $P\text{-Value} = 0,066$ lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien beta $0,032$. Hal ini berarti bahwa rasio kontribusi BUMD (X_6) berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal (Y), dimana jika rasio kontribusi BUMD tahun lalu naik sebesar 1 persen, maka alokasi belanja modal tahun berikutnya akan naik sebesar $0,032$ persen. Hasil uji ini menolak hipotesis $H_{a.6}$ yang menyatakan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal. Kondisi ini terjadi kemungkinan disebabkan karena penerimaan laba BUMD dari tahun ke tahun relatif masih kecil, sehingga kurang mampu membantu dalam pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sularso dan Restianto (2011) yang menyatakan derajat kontribusi BUMD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal, rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal.

Saran dalam penelitian ini adalah pertama, pemerintah daerah diharapkan lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat bisa dikurangi. Selain itu, pemerintah daerah sebaiknya lebih banyak mengalokasikan hasil pendapatan daerah pada anggaran belanja modal atau belanja pembangunan sebagai salah satu alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah dan meminimalisir alokasi belanja rutin yang tidak perlu. Kedua, bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan indikator untuk mengukur kinerja keuangan dan menggunakan periode penelitian yang berbeda serta memperluas lokasi penelitian tidak hanya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

REFERENSI

- Ardhini dan Handayani. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dan Perspektif Teori Keagenan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Azkiya, Ardan. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Ilmiah*. Universitas Sebelas Maret.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. Deskripsi dan Analisis APBD 2013. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fajar Hidayat, Mochamad. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sularso, H., Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, Vol.1 No.2: 109-124.
- Vella KF, M. Rasuli, dan Alfiati Silfi. 2014. Pengaruh rasio keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2009-2012. *Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Riau*.